



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAHRI SULI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NIK : 198245

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.450.000.000

1. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN
Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 594 m2/155 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 974 m2/290 m2 di KAB / KOTA
LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Tanah Seluas 440 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
7. Tanah Seluas 792 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 265.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 2 DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
12.500.000



2. MOTOR, YAMAHA GT 125 (25V) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ GK5 1.5 RS CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 180.240.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 360.326.578

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.255.566.578

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.255.566.578

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.